



## IMPLEMENTASI DISTRIBUSI PEMBIAYAAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR ISLAM

Mazidatul Husna<sup>1</sup>, Dewi Enjelia Febriani<sup>2</sup>, Alwan Khoiri<sup>3</sup>, Nita Agustina<sup>4</sup>,  
Nurlaila Eka Erfiana<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,  
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: [mazidatulhusna5@gmail.com](mailto:mazidatulhusna5@gmail.com), [dewifebri2702@gmail.com](mailto:dewifebri2702@gmail.com),  
[alwanalways294@gmail.com](mailto:alwanalways294@gmail.com), [nitaagustina37@gmail.com](mailto:nitaagustina37@gmail.com)

### Article Information

<http://journal.unusia.ac.id/index.php/mozaic/>

### DOI:

<http://10.47776/mozaic.v8i2.600>

### Informasi Artikel

Naskah diterima: 2  
September 2022

Naskah direvisi: 20  
September 2022

Naskah disetujui: 15  
Oktober 2022

Naskah dipublish: 31  
Oktober 2022

### Abstract

*This study aims to determine the management, goals, and problems in implementing the distribution of financing in Islamic basic educational institutions. Method The method used is the library study method which is useful for obtaining a theoretical basis for the problem to be studied. Funding for education basically focuses on efforts to distribute benefits education and the burden that must be borne by society. In financing education, the most important thing is the amount of money that must be spent, and where it will come from source of money obtained, and to whom the money must be spent so that it is necessary to distribute education funding appropriately. The distribution of funds in basic Islamic education institutions such as Madrasah Ibtidaiyah (MI) aims to purchase rental facilities, equipment and tools needed to support the teaching and learning process of educators and students in these madrasas with the aim of obtaining the expected educational goals such as implementing programs to improve quality human resources and madrasa conditions.*

### Keywords

*Distribution,  
Institution Islamic  
Basic Education,  
Education Financing*

### Kata Kunci

*Distribusi, Lembaga  
Pendidikan Dasar  
Islam, Pembiayaan  
Pendidikan*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan, tujuan, dan masalah dalam implementasi distribusi pembiayaan dalam lembaga pendidikan dasar Islam. Metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Dalam pembiayaan pendidikan hal yang sangat penting adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang tersebut harus dibelanjakan sehingga diperlukan pendistribusian pembiayaan pendidikan secara tepat. Pendistribusian dana dalam lembaga pendidikan dasar Islam seperti pada

Madrasah Ibtidaiyah (MI) bertujuan untuk pembelian sewa sarana, perlengkapan, dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mengajar pendidik dan peserta didik dalam madrasah tersebut dengan maksud memperoleh tujuan pendidikan yang diharapkan seperti terlaksananya program untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kondisi madrasah yang berkualitas.

## **PENDAHULUAN**

Biaya pendidikan adalah suatu hal yang berbentuk instrumental dan sangat penting untuk mempersiapkan tenaga kependidikan melalui program yang diselenggarakan di sekolah maupun madrasah. Masyarakat membutuhkan pendidikan yang berkualitas, terkadang masih berhadapan dengan situasi kondisi sekolah, contohnya kurangnya guru yang bermutu, biaya sekolah yang terbatas, sarana yang belum mencukupi, lingkungan sekolah yang tidak kondusif. Sekolah dapat menciptakan lingkungan yang baik dengan kerjasama antar orangtua dan siswa.<sup>1</sup> Pendapat H.A.R Tilaar lemahnya pendidikan Islam berakibat sekolah tersisihkan dari mainstreamnya pendidikan nasional sehingga terjebak dalam dualisme yang palsu atau buatan, seperti adanya dikhotomi pendidikan Islam sekuler dan pemikiran pembaharuan dalam pendidikan Islam sebagai kekuatan yang perlu diperhatikan.<sup>2</sup>

Manajemen sekolah menjadi sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan proses pendidikan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Salah satu komponen dari manajemen sekolah adalah adanya pembiayaan pendidikan. Pembiayaan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) Standar Mutu Madrasah Terpadu sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2005 tentang Kriteria Pendanaan dan Peraturan Menteri terkait No. 69 Tahun 2009, Jaringan Madrasah Terpadu Tahun 2010, 143 Pengelolaan keuangan sangat penting untuk penganggaran penyelenggaraan pendidikan suatu lembaga, dana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan wali murid, serta pengelolaan keuangan lembaga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Bedjo Susanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah* (Jakarta: Sagung Seto, 2007), hal.

<sup>2</sup>A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 11.

<sup>3</sup>Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2017), hal. 5.

Pendanaan dalam proses penyelenggaraan sekolah telah menjadi prioritas utama dalam proses pendidikan dasar. Terkait dengan kebijakan pembiayaan, tanggung jawab ini ada pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan orang tua yang dituju. Keputusan pendanaan pendidikan akan mempengaruhi layanan yang diberikan kepada siswa maupun tenaga kependidikan di lembaga tersebut.<sup>4</sup> Pengelolaan keuangan yang baik untuk menstabilkan keuangan sekolah dengan mendirikan beberapa tempat makanan (kantin dan koperasi) dan selain itu tempat percetakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengeksplorasi implementasi distribusi pembiayaan dalam lembaga pendidikan dasar Islam untuk mencapai tujuan pengelolaan distribusi dana pendidikan yang telah ditetapkan guna mensukseskan tujuan madrasah/sekolah yang berkualitas.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti memilih metode penelitian *library research* atau studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi dan pernyataan serta menjawab masalah dalam penelitian tersebut. Metode ini menggunakan studi kepustakaan dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan distribusi dana pendidikan di lembaga pendidikan dasar Islam. Penyaluran dana pada madrasah seperti Madrasah Ibtidaiyah ditujukan untuk membeli, menyewakan sarana, perlengkapan dan peralatan guna menunjang proses belajar mengajar di kalangan pendidik dan peserta didik madrasah tersebut guna memenuhi kualitas, mutu atau standar pendidikan dengan baik sesuai harapan yang diinginkan.

## **KAJIAN TEORI**

Konsep pembiayaan Pendidikan bisa dijabarkan sebagai cara memperoleh uang atau dana Pendidikan untuk membiayai atau memenuhi semua kebutuhan lembaga Pendidikan tersebut entah dari mana uang tersebut berasal, kemana uang itu dibelanjakan, dan kepada siapa uang itu dibelanjakan. Pembiayaan Pendidikan dapat

---

<sup>4</sup>Susiana, *Pola Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta MIS Al Jihad Medan Sunggal* (Medan: Pascasarjana Universitas Negeri Medan, 2016), hal. 10.

<sup>5</sup>Oktafia, "Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 1, 2017.  
Vol. 8 No. 2. Oktober 2022                      Halaman 120 – 129

dikategorikan sebagai administrasi dan manajemen bisnis dalam madrasah atau lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

Kemudian ada hal penting mengenai distribusi pembiayaan Pendidikan mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu penekanan pada pembiayaan Pendidikan dan kebutuhan ekonomi Pendidikan itu sangat berbeda. Pelaksanaan distribusi merupakan penyaluran barang dalam hal ini berupa dana BOS atau dana BOP PAUD yang disalurkan dari pemerintah ke madrasah/sekolah yang membutuhkan bantuan dana tersebut untuk membiayai segala bentuk proses Pendidikan yang berlangsung agar memenuhi standar yang diharapkan.

Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah kegiatan mengenai penerimaan biaya atau dana, biaya pendapatan untuk tujuan pembiayaan semua program dan kebutuhan Pendidikan sesuai dengan ketentuan. Sumber dana atau biaya Pendidikan yang diterima oleh madrasah/sekolah bisa berasal dari anggaran keuangan negara dan anggaran keuangan daerah masyarakat bahkan orang tua.

Dalam penggunaan dana, setiap sekolah harus mengkoordinasikan dan merumuskan rencana utama pembiayaan Pendidikan yaitu merencanakan rencana pembiayaan sekolah dan membuat keputusan besar di bidang-bidang utama yaitu proyek Pendidikan harus dipromosikan. Pendanaan, sistem perpajakan untuk pembiayaan proyek dan sistem penyaluran dana negara menurut kabupaten atau wilayah Pendidikan sekolah.<sup>6</sup>

## **PENGELOLAAN DISTRIBUSI PEMBIAYAAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR ISLAM**

Undang-Undang otonomi daerah yang berisikan tentang wewenang dan semua kepentingan kekuasaan tertinggi di pendidikan maupun kebudayaan yang telah ada di posisi kekuasaan tertinggi pusat ke pemerintah daerah. Di masa aturan baru, biaya yang akan di berikan ke lembaga ke pendidikan lebih dominan umumnya bersumber dari biaya yang telah di berikan oleh pemerintah pusat dan juga oleh PAD yang dikaji pada RAPBD. Tetapi sejak adanya kebijakan tentang otonomi daerah di tetapkan, pola

---

<sup>6</sup>Mohammad Roji, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), hal. 2-3.

pengelolaan sedikit beda.

Dimana kebanyakan biaya pendidikan digunakan untuk provinsi serta kabupaten/ kota permanen bersumber dari kekuasaan tertinggi yang di berikan berupa paket maupun berupa biaya alokasi umum. Namun saat ini tanggungan pengolahan semuanya di berikan ke daerah. Maksudnya seberapa besar perdaerah mengalokasikan<sup>7</sup> biaya pendidikan semuanya tergantung kepada keputusan serta kepekaan daerah terhadap persoalan pendidikan.<sup>8</sup>

## **TUJUAN DISTRIBUSI PEMBIAYAAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR ISLAM**

Distribusi dana pendidikan sekolah harus tercermin dalam penggunaannya, yaitu penggunaan dana sekolah untuk menjalankan sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan. Selain itu, perlu adanya sarana atau fasilitas pembelajaran yang memadai yang relevan dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang optimal bagi proses pendidikan dan pengajaran pendidik dan peserta didik. Manfaat dana yang tersalurkan dengan baik untuk operasional sekolah terbukti, terutama dalam hal mendidik dan membantu siswa dari segi kebutuhannya. Pendistribusian dana dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya, maka kegiatan tersebut harus dikelola melalui tahapan proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi penggalangan dana, pemantauan dan evaluasi operasional sekolah dimana dana dialokasikan menurut tujuan pendidikan dan tujuan penggunaannya.<sup>9</sup>

Dengan dana BOS, proses belajar mengajar dapat berlangsung tanpa dipungut biaya, karena seluruh biaya akan dipenuhi oleh pemerintah pusat. Hal tersebut, telah membuat sekolah/madrasah lebih luas diakses oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Dana BOS telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas madrasah yang diukur dengan naiknya sertifikasi madrasah, naiknya jumlah siswa, baik siswa yang tetap bersekolah dan putus sekolah. Dampak positif BOS terlihat dari

---

<sup>7</sup>Mohammad Roji, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam* (Sidoarjo : UMSIDA Press, 2020), hal. 2-3.

<sup>8</sup>Suwandi, “*Arah Kebijakan Pemanfaatan dan Penyaluran Dana Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah*”, *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Vol. 21, No. 2, 2012, hal. 172.

<sup>9</sup>Dinar, “*Pendistribusian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Pendidikan Siswa di SMP Negeri 1 Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai*”, *Artikel Ilmiah Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat*, 2015.

catatan prestasi belajar murid di sekolah atau madrasah tersebut, termasuk berbagai kegiatan baik intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Dengan adanya dana bantuan dari pemerintah dapat membuat iklim sekolah dan semangat belajar siswa semakin tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>10</sup>

## **MASALAH DISTRIBUSI PEMBIAYAAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR ISLAM**

Masalah pendistribusian dana pendidikan tidak hanya terjadi antara SD, SMP, dan SMA, tetapi juga antara sekolah negeri dan sekolah agama. MI, Mts, dan MA Negeri telah menerima dana BOS yang jauh lebih sedikit daripada sekolah negeri. Sekolah keagamaan pada biasanya mempunyai syarat fisik dan pembelajarannya masih belum memenuhi standar Pelayanan Minimal yang layak, akibatnya mutu lulusannya pula masih rendah. Hal tadi antara lain karena kurangnya dana akibat ketimpangan distribusi diatas mensinyalir ketimpangan distribusi pembiayaan Pendidikan yang lebih luas.

Ketimpangan distribusi pembiayaan pendidikan mencakup banyak dimensi, yaitu; dimensi pertama artinya kesenjangan antara pusat dan wilayah; dimensi kedua adalah kesenjangan antara keluarga, rakyat, serta sekolah; dimensi ketiga adalah kesenjangan antar jenjang pendidikan dasar, menengah, serta tinggi; dimensi keempat artinya kesenjangan antara sekolah desa serta kota; dimensi kelima ialah kesenjangan antara sekolah negeri serta swasta; dimensi keenam artinya kesenjangan antara sekolah umum serta agama.<sup>11</sup>

Pelaksanaan di lapangan masih berada di tangan mereka yang tidak mengerti untuk apa dan bagaimana dana BOS digunakan, dan seringkali menjadi beban sekolah bahkan orang tua sebagai masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya orientasi yang baik bahwa penggunaan dana bantuan operasional sekolah setidaknya melibatkan empat

---

<sup>10</sup>Nur Tsalisakmala, *Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Swasta Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, hal. 6

<sup>11</sup>Arif Rohman, *“Ketimpangan Distribusi Pembiayaan Pendidikan di Indonesia”*, Jurnal Ilmiah Guru, No. 1, 2003, hal. 16.

aspek, baik itu efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.<sup>12</sup> Sehingga solusi yang diperlukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah pemerintah dapat membuat platform untuk masyarakat agar dapat mengawal dan mengawasi penggunaan dana BOS, dengan begitu masyarakat dapat memastikan satuan Pendidikan telah menerima, menyalurkan atau memanfaatkan dana BOS dengan baik.

## **IMPLEMENTASI DISTRIBUSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR ISLAM**

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan proses pencapaian keberhasilan organisasi/lembaga dalam hal peningkatan kualitas, luasnya akses, dan efisiensi pengelolaan proses pendidikan. Pendanaan BOS untuk kegiatan pembelajaran dan biaya operasional sekolah dapat diberikan sesuai kebutuhan karena ditanggung oleh pemerintah. Hal ini dapat membuat pendidikan dapat diakses secara luas dan terjangkau untuk semua masyarakat.

Pendistribusian dana BOS meliputi delapan standar, yaitu standar kemampuan lulusan, standar proses, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana pendidikan, standar pengelolaan, standar pendanaan, dan standar penilaian. Dimana dengan adanya delapan standar tersebut dapat memungkinkan terwujudnya pembiayaan Pendidikan yang sesuai mutu dan standar pemerintah sehingga proses pembelajaran di lembaga Pendidikan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Pendidik, termasuk guru dan kepala sekolah, juga memiliki fungsi dan tugas untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sistem pendidikan nasional yang meliputi visi dan misi, dan tujuan pendidikan, serta menciptakan perencanaan pendidikan nasional yang baik guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas termasuk pendidikan yang kompetitif dalam kehidupan sekarang ini. Untuk mencapai hal tersebut, madrasah harus mampu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembelajaran dan pembiayaan sekolah atau madrasah<sup>12</sup>. Implementasi distribusi pembiayaan pendidikan dalam lembaga

---

<sup>12</sup>Lika, "Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)", *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 3, 2016, hal. 1218.  
Vol. 8 No. 2. Oktober 2022 Halaman 120 – 129

pendidikan dasar Islam yaitu:

#### **A. Madrasah Swasta**

Penyaluran dana swasta ke BOS Madrasah menjadi tanggung jawab kerja Ditjen Pendis yang sama dengan praktik tertentu yang telah ditetapkan. Dana BOS dicairkan Madrasah melalui mekanisme pembayaran ke rekening penerima Dana Madrasah dengan langkah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) (PPK) membuat pengajuan kepada PPSPM yang dilampirkan sekurangkurangnya pada surat keputusan terkait hal yang ditetapkan sebagai penerima BOS di madrasah; Perjanjian pelaksanaan kerjasama pembagian BOS dengan bank/kantor pos.
- 2) PPSPM akan menerbitkan SPM yang kemudian dikirimkan ke KPPN Jakarta.
- 3) Direktur KPPN Jakarta IV akan menerbitkan surat perintah pembayaran yayasan SP2D dengan menggunakan rekening channeling;
- 4) PPK segera mengirimkan SPPb ke Bank Terusan guna mentransfer dana operasional ke rekening penerima tersebut. Dan estimasi keterlambatan yaitu 15 hari kalender sesuai kalender perundang-undangan.
- 5) Pengelola madrasah akan menyerahkan pengajuan dan uang dan akan memenuhi persyaratan yang akan ditentukan.
- 6) Laporan pembukuan dana setelah pekerjaan akan disampaikan kepala madrasah pada akhir tahun.

#### **B. Madrasah Negeri**

Pengalokasian dana BOS ke satuan kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan DIPA Dirjen Pendis sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Kementerian Keuangan tentang perencanaan anggaran terpisah Bagan Akun Standar (BAS) dan dana BOS untuk digunakan dalam bentuk DIPA Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM). Teknis penyaluran dana BOS sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pembayaran dana Pengeluaran dana BOS kepada Satker Madrasah

---

<sup>13</sup>Nur Tsalisakmala, "Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang" ..., hal. 3-4.



Ibtidaiyah (MIN) dan Madrasah Negeri lainnya mengacu pada rencana pengeluaran selama satu tahun, rencana penggunaan yang terintegrasi melalui pembuatan SPM bahwa hal tersebut disebutkan dalam satker DIPA.

- 2) Anggaran BOS MIN ditempatkan Departemen Agama Kota. KPA dapat mengangkat kepala MIN dari luar atau pejabat tertentu yang mempunyai sertifikat PBJ sebagai PPK.
- 3) Dalam mempermudah proses pencairan dana dari Kementerian Agama kepada BPP MIN, maka BPP membentuk rekening bank untuk biaya beasiswa yang dikelola oleh BPP. Akun BPP ini adalah akun resmi, bukan akun pribadi.
- 4) Dalam hal PPK, MIN diselenggarakan oleh PPK di luar MIN, maka kepala MIN Madrasah tersebut bertanggung jawab untuk mengelola dana BOS tersebut.
- 5) Pelaksanaan anggaran BOS diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai prosedur pembayaran terkait dengan implementasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang diubah oleh Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 mengenai perubahan terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 mengenai Pelaksanaan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan.

## **KESIMPULAN**

Mengelola penyaluran dana pendidikan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, semua urusan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan negara dialihkan ke kotamadya (kabupaten/kota). Tujuan penyaluran dana pendidikan adalah untuk membantu pendidikan dan siswa yang ekonominya kurang mampu, maka dari itu agar penyaluran dana lancar dan tercapainya tujuan maka kegiatan ini harus disalurkan melalui proses pembelajaran. suatu proses yang diawali dengan perencanaan keuangan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya pendidikan antara lain meliputi beberapa dimensi, pertama adalah ruang antara pusat dan daerah; dimensi kedua adalah kesenjangan antara keluarga, masyarakat dan sekolah, dimensi ketiga adalah perbedaan antara pendidikan dasar, menengah dan tinggi; dimensi keempat adalah kesenjangan

antara sekolah desa dan kota; dimensi kelima adalah kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta; dimensi keenam adalah kesenjangan antara sekolah umum dan sekolah agama. Penyaluran dana di madrasah negeri dapat dibagi dengan bentuk penyaluran untuk madrasah swasta dan madrasah negeri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian. Indra. 2017. Akuntansi Pendidikan. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Dinar. 2015. "Pendistribusian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Pendidikan Siswa di SMP Negeri 1 Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai". Artikel Ilmiah Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam. 2021. Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Lika, 2016. "Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)", Journal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 3.
- Malik Fadjar. 1998. Madrasah dan Tantangan Modernitas, Bandung: Mizan.
- Mohamad Roji, dkk. 2020. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam, Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Oktafia. 2017. "Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing". Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8, No. 1.
- Rohman, Arif. 2003. "Ketimpangan Distribusi Pembiayaan Pendidikan di Indonesia". Jurnal Ilmiah Guru, No.1.
- Sujanto, Bedjo. 2007. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Jakarta: Sagung Seto.
- Susiana. 2016. Pola Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta MIS Al Jihad Medan Sunggal, Medan: Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- Suwandi. 2012. "Arah Kebijakan Pemanfaatan dan Penyaluran Dana Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah". Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol. 21, No. 2.
- Tsalisakmala, Nur. 2019. "Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Opeasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Swasta Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.